

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achi Sudiarti Luhulima, 2006, *Hak Perempuan Dalam Konstitusi Dalam Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 89

Anggriani Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 40

Gadis Arivia, 2006, *Feminisme : Sebuah Kata Hati*, Kompas, Jakarta, hlm. 311

Henry Campbell Black, *Black'S Law Dictionary*, West Publishing, 1990, hlm. 133

HR Ridwan 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 18

J.G. Starke, *Introduction to International Law* 429, Butterworth, London, 1984

Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik*, Bandung: Nuansa, hlm 56

Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, hlm. 21

Mansour Fakih, 2003, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Insist Press, Jakarta hlm. 51

Margaret A. Schuler, 2001, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah*, Jakarta: LBH APIK, hlm 13

Mochtar Kusumaatdja, 1976, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Jakarta, hlm. 114

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, hlm.280

Pokja Convention Watch & Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, hlm. 5

Romany Sihite, 2005, *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta; PT. Grafindo Persada, hlm. 130

Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, hlm. 147

Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 2

Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, hlm 29

Sri Wiyanti Eddyono, 2007, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, ELSAM, Jakarta, hlm. 1

Women, Law and Development, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah*, terjemahan dan terbitan LBH APIK Jakarta, 2001, hal. 13

Jurnal, Makalah, Skripsi dan Artikel

Nalom Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Agama", Jurnal Konstitusi, Vol IV. No. 1 Juni 2011.

Pingkan Cahya Rosanti, 2018 *“Upaya UN Women Bersama Pemerintah India Mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam Mengurangi Diskriminasi Perempuan di India”*, Skripsi, Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm. 2

Bagir Manan, Makalah Pada Temu Ilmiah Nasional: “Pemikiran Hukum Berkonstitusi di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999, hlm. 2

Philipus M. Hadjon, Makalah: “Tentang Wewenang”, Univ. Airlangga Yuridika No 5 & 6 Tahun XII, 1997, hlm. 1

Rini Maryam, “Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 1, hlm. 100

Isbodroini Suyanto, CEDAW Harapan Bagi Kaum Perempuan, Pusat Informasi Wanita dalam Pembangunan PDII-LIPI, hlm 1

Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol.12 Nomor 4, 2015, hlm. 731.

Hikmahanto Juwana, “Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional”, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1 2019, hlm. 12

Immanuel Agung Pramuji, “Pemberdayaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri di Desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fisip Unmul 2013, hlm 1.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, hlm. 1

Perjanjian Internasional dan Peraturan Perundang - Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 (DUHAM)

Undang – Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW

Undang - Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang - Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang – Undangan

Undang - Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Palopo No. 41 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

Website

[Sejarah dan Latar belakang CEDAW – suduthukum.com](#)

[IWRAW Asia Pacific :: International Women's Rights Action Watch Asia Pacific \(iwrw-ap.org\)](#)

[Frequently asked questions \(FAQ\) about CEDAW | UN Women – Asia-Pacific](#)

[https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx,](https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx)

[herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/prinsip-prinsip-ham-pdf.](http://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/prinsip-prinsip-ham-pdf)

<https://law.uui.ac.id/blog/tag/hukum-eropa-kontinental-civil-law-system/>

<https://www.kemenpppa.go.id/>

<https://komnasperempuan.go.id/>

Koran *Online*

<https://www.kompas.tv/article/135821/kdrt-meningkat-selama-pandemi-ini-bantuan-strategi-dari-komnas-perempuan-serta-kementerian-pppa>

<https://palopopos.co.id/2019/10/anak-11-tahun-melahirkan/>

[Pernyataan Komnas Perempuan tentang “34 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia: Kurang Optimalnya Implementasi CEDAW dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. | Portal Berita Kristen Indonesia \(suarakristen.com\)](#)